



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تفه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka Menghadapai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dengan penyesuaian alokasi dan pemotongan dana desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, terdapat pengurangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/ 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyesuaian penyaluran Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau Stabilitas system keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 131 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Kampung adalah Reje kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

4. Pemerintah.....

4. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat;
7. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje;
8. Musyawarah kampung adalah musyawarah antara rayat genap mupakat, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh rayat genap mupakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat;
10. Keputusan reje adalah keputusan yang ditetapkan oleh reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun peraturan reje kampung;
11. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
13. Pendapatan Asli Kampung, yang selanjutnya disingkat PAKam, adalah pendapatan asli kampung merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Kampung, Pendapatan Asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan;
14. Transfer ke daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa;

15. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan;
16. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh kabupaten kepada kampung yang tidak habis digunakan oleh kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBKampung (SiLPA);
17. Pembangunan kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
18. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat hak asal usul;
19. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung;
20. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan;

23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan aparat Pembinaan dan Pemberdayaan intern pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
29. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk pedoman bagi pemerintah kampung tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk petunjuk tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung bagi pemerintah kampung dalam penyusunan perubahan APBKampung.

BAB III JUMLAH KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Kampung terdiri atas kampung yang telah mempunyai kode dan data wilayah administrasi kampung dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Jumlah kampung di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah yang telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sejumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, Pagu Dana Kampung Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan sebesar Rp. 223.350.548.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari semula sebesar Rp. 226.538.613.000 (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Kampung dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar (AD), yang semula sebesar Rp. 662.806.000,- menjadi Rp. 651.999.000,- untuk masing-masing Kampung.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu Dana Kampung untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bupati melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung.

(2)Penyesuaian.....

- (2) Penyesuaian penghitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Kampung.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar untuk masing-masing Kampung dengan jumlah Kampung di Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Berdasarkan penyesuaian rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung yang telah ditetapkan.
- (5) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi kinerja; dan
 - c. alokasi formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung.

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf b, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan dana kampung dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) dana kampung dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAKampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana pada Pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang/ jasa dana kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada Pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Aceh Tengah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Aceh Tengah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Aceh Tengah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Aceh Tengah

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Aceh Tengah

Pasal 11

Penetapan rincian dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. qanun kampung mengenai APBKampung; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung;
 - b. tahap II berupa:
 1. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung;

2.peraturan.....

2. peraturan kampung mengenai perubahan APBKampung;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 dan huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 dan huruf c angka 4 dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kampung yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, dan capaian keluaran.
 - (12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (13) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I, Dana Kampung disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1):
 - a. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.
- (3) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9), Reje Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Kampung mengenai APBKampung;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (11) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati c.q Kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4), Bupati c.q Kepala BPKK menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Reje Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Reje kampung menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kampung di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada bupati.

(8).Tata Cara.....

- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Kampung.
- (3) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berupa BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
- a. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,-.....

- b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (10) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah.

Pasal 18

- (1) Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan kampung mengenai APBKampung.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 20

- (1) Reje Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

(3) Pendampingan.....

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Kampung secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 - b. penyaluran Dana Kampung;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten;
 - e. sisa Dana Kampung di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Kampung.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sisi Dana Kampung di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Kampung.
- (2) Sisa Dana Kampung di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.
- (3) Reje Kampung melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (4) Reje Kampung menyetorkan sisa Dana Kampung di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (5) Sisa Dana Kampung tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

(6).Bupati.....

- (6) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung atas data kumulatif sisa Dana Kampung tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Reje Kampung ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (7) Bupati menyetorkan sisa Dana Kampung di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (8) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri Keuangan mempertimbangkan sisa Dana Kampung tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (10) Dalam hal terdapat sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (11) Penghitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdapat sisa Dana Kampung di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Reje Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Reje Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Reje Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap III.
- (5) Dalam hal Reje Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (6) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Reje Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (7) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), status hukum reje Kampung ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (9) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah Dana Kampung tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Reje Kampung yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Kampung.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB X PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal, 24 Agustus 2020

↳ BUPATI ACEH TENGAH ✎

✎ 
✎ SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, 25 Agustus 2020

✎ SEKRETARIS DAERAH ✎

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR: 669

**PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA KAMPUNG PER-KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
I.	LINGE					
1		Delung Sekinel	651,999,000	-	67,407,000	719,406,000
2		Gelampang Gading	651,999,000	-	53,141,000	705,140,000
3		Gewat	651,999,000	-	148,663,000	800,662,000
4		Jamat	651,999,000	-	81,054,000	733,053,000
5		Kemerleng	651,999,000	-	93,248,000	745,247,000
6		Kute Baru	651,999,000	-	71,340,000	723,339,000
7		Kute Keramil	651,999,000	-	98,590,000	750,589,000
8		Kute Rayang	651,999,000	-	180,006,000	832,005,000
9		Kute Riyem	651,999,000	-	77,775,000	729,774,000
10		Kute Robel	651,999,000	-	170,112,000	822,111,000
11		Linge	651,999,000	-	88,323,000	740,322,000
12		Lumut	651,999,000	-	92,441,000	744,440,000
13		Mungkur	651,999,000	-	262,150,000	914,149,000
14		Owaq	651,999,000	-	127,818,000	779,817,000
15		Pantan Nangka	651,999,000	-	115,127,000	767,126,000
16		Penarun	651,999,000	-	121,945,000	773,944,000
17		Simpang Tige Uning	651,999,000	-	159,515,000	811,514,000
18		Umang	651,999,000	-	229,564,000	881,563,000
19		Despot Linge	651,999,000	144,096,000	120,696,000	916,791,000
20		Gemboyah	651,999,000	-	123,780,000	775,779,000
21		Arul Item	651,999,000	-	142,131,000	794,130,000
22		Ise-Ise	651,999,000	-	190,768,000	842,767,000
23		Kute Reje	651,999,000	-	94,931,000	746,930,000
24		Reje Payung	651,999,000	-	101,745,000	753,744,000
25		Pantan Reduk	651,999,000	-	129,398,000	781,397,000
26		Antara	651,999,000	-	77,666,000	729,665,000
II.	SILIH NARA		-			
1		Arul Gele	651,999,000	-	69,149,000	721,148,000
2		Arul Kumer	651,999,000	-	127,199,000	779,198,000
3		Burni Bius	651,999,000	-	45,607,000	697,606,000
4		Genting Gerbang	651,999,000	-	80,925,000	732,924,000
5		Gunung Singit	651,999,000	-	49,874,000	701,873,000
6		Pepayungan Angkup	651,999,000	-	111,150,000	763,149,000
7		Remesen	651,999,000	-	56,000,000	707,999,000
8		Rutih	651,999,000	-	112,413,000	764,412,000
9		Semelit Mutiara	651,999,000	-	260,839,000	912,838,000
10		Wih Porak	651,999,000	-	55,422,000	707,421,000
11		Wih Bakong	651,999,000	144,096,000	58,352,000	854,447,000
12		Wihni Durin	651,999,000	-	109,448,000	761,447,000
13		Arul Putih	651,999,000	-	75,024,000	727,023,000
14		Arul Relem	651,999,000	-	146,525,000	798,524,000
15		Burni Bius Baru	651,999,000	-	41,572,000	693,571,000
16		Jerata	651,999,000	-	180,207,000	832,206,000
17		Paya Beke	651,999,000	-	165,367,000	817,366,000
18		Paya Pelu	651,999,000	-	94,174,000	746,173,000
19		Rebe Gedung	651,999,000	-	37,708,000	689,707,000
20		Reremal	651,999,000	-	78,531,000	730,530,000
21		Senehen	651,999,000	-	56,533,000	708,532,000
22		Simpang Kemili	651,999,000	-	87,516,000	739,515,000
23		Tenebuk Kampung Baru	651,999,000	-	63,241,000	715,240,000
24		Terang Engon	651,999,000	-	83,148,000	735,147,000
25		Wih Pesam	651,999,000	144,096,000	112,897,000	908,992,000
26		Bius Utama	651,999,000	-	64,986,000	716,985,000
27		Meker Indah	651,999,000	144,096,000	47,980,000	844,075,000
28		Mulie Jadi	651,999,000	-	120,182,000	772,181,000
29		Wih Bersih	651,999,000	144,096,000	38,626,000	834,721,000
30		Wih Sagi Indah	651,999,000	-	52,130,000	704,129,000

31		Arul Kumer Barat	651,999,000	-	90,160,000	742,159,000
32		Arul Kumer Timur	651,999,000	-	87,556,000	739,555,000
33		Arul Kumer Selatan	651,999,000	-	98,881,000	750,880,000
III.	BEBESEN		-			
1		Blang Kolak I	651,999,000	-	75,288,000	727,287,000
2		Bebesan	651,999,000	-	80,147,000	732,146,000
3		Mongal	651,999,000	-	103,085,000	755,084,000
4		Daling	651,999,000	-	63,638,000	715,637,000
5		Tensaran	651,999,000	-	120,997,000	772,996,000
6		Lelabu	651,999,000	-	47,767,000	699,766,000
7		Blang Gele	651,999,000	-	68,578,000	720,577,000
8		Kemili	651,999,000	-	128,913,000	780,912,000
9		Tan Saril	651,999,000	144,096,000	43,345,000	839,440,000
10		Blang Kolak II	651,999,000	-	74,789,000	726,788,000
11		Umang	651,999,000	-	48,865,000	700,864,000
12		Simpang IV	651,999,000	-	81,696,000	733,695,000
13		Bahgie	651,999,000	144,096,000	55,626,000	851,721,000
14		Keramat Mupakat	651,999,000	-	207,066,000	859,065,000
15		Atu Gajah Reje Guru	651,999,000	-	85,047,000	737,046,000
16		Atu Tulu	651,999,000	-	53,044,000	705,043,000
17		Burbiah	651,999,000	-	92,470,000	744,469,000
18		Empus Talu	651,999,000	-	37,568,000	689,567,000
19		Gele Lah	651,999,000	-	35,596,000	687,595,000
20		Kebet	651,999,000	-	64,344,000	716,343,000
21		Lemah Burbana	651,999,000	-	69,047,000	721,046,000
22		Mah Bengi	651,999,000	-	63,844,000	715,843,000
23		Nunang Antara	651,999,000	-	148,452,000	800,451,000
24		Pendere Saril	651,999,000	-	65,883,000	717,882,000
25		Sadong Juru Mudi	651,999,000	-	48,275,000	700,274,000
26		Ulu Nuwih	651,999,000	-	76,086,000	728,085,000
27		Colo Blang Gele	651,999,000	-	51,856,000	703,855,000
28		Kala Kemili	651,999,000	-	69,601,000	721,600,000
IV.	PEGASING		-			
1		Arul Badak	651,999,000	-	168,005,000	820,004,000
2		Berawang Baro	651,999,000	144,096,000	109,894,000	905,989,000
3		Gelelungi	651,999,000	-	107,537,000	759,536,000
4		le Reulop	651,999,000	-	101,403,000	753,402,000
5		Kayu Kul	651,999,000	-	50,994,000	702,993,000
6		Kedelah	651,999,000	-	42,702,000	694,701,000
7		Kung	651,999,000	144,096,000	103,551,000	899,646,000
8		Kute Lintang	651,999,000	-	245,335,000	897,334,000
9		Lelumu	651,999,000	-	103,466,000	755,465,000
10		Paya Jeget	651,999,000	-	69,234,000	721,233,000
11		Pedekok	651,999,000	-	71,517,000	723,516,000
12		Pegasing	651,999,000	-	190,179,000	842,178,000
13		Pepalang	651,999,000	-	119,182,000	771,181,000
14		Simpang Kelaping	651,999,000	-	136,183,000	788,182,000
15		Tebuk	651,999,000	-	96,088,000	748,087,000
16		Terang Ulen	651,999,000	144,096,000	68,992,000	865,087,000
17		Ujung Gele	651,999,000	-	123,093,000	775,092,000
18		Wih Ilang	651,999,000	-	157,736,000	809,735,000
19		Wih Nareh	651,999,000	144,096,000	57,557,000	853,652,000
20		Wih Lah	651,999,000	-	69,013,000	721,012,000
21		Jejem	651,999,000	-	68,922,000	720,921,000
22		Jurusen	651,999,000	-	44,665,000	696,664,000
23		Kala Pegasing	651,999,000	-	49,313,000	701,312,000
24		Linung Ayu	651,999,000	-	46,083,000	698,082,000
25		Panangan Mata	651,999,000	-	65,134,000	717,133,000
26		Pantan Musara	651,999,000	-	169,201,000	821,200,000
27		Wih Terjun	651,999,000	-	83,468,000	735,467,000
28		Belang Bebangka	651,999,000	-	168,841,000	820,840,000
29		Uning	651,999,000	-	181,710,000	833,709,000
30		Uring	651,999,000	-	80,153,000	732,152,000
31		Suka Damai	651,999,000	-	69,502,000	721,501,000
V.	BINTANG		-			
1		Atu Payung	651,999,000	-	134,822,000	786,821,000
2		Bale Nosar	651,999,000	-	84,084,000	736,083,000
3		Bamil Nosar	651,999,000	-	62,439,000	714,438,000
4		Bewang	651,999,000	-	77,351,000	729,350,000
5		Dedamar	651,999,000	-	196,861,000	848,860,000
6		Genuren	651,999,000	-	153,522,000	805,521,000
7		Kala Bintang	651,999,000	144,096,000	93,266,000	889,361,000

8		Kala Segi	651,999,000	-	60,217,000	712,216,000
9		Kejurun Syiah Utama	651,999,000	144,096,000	59,860,000	855,955,000
10		Kelitu Sintep	651,999,000	-	61,796,000	713,795,000
11		Kuala I	651,999,000	-	39,515,000	691,514,000
12		Kuala II	651,999,000	-	78,069,000	730,068,000
13		Linung Bulen I	651,999,000	-	108,583,000	760,582,000
14		Linung Bulen II	651,999,000	144,096,000	147,761,000	943,856,000
15		Mengaya	651,999,000	-	148,822,000	800,821,000
16		Mude Nosar	651,999,000	-	73,808,000	725,807,000
17		Serule	651,999,000	-	174,193,000	826,192,000
18		Wakil Jalil	651,999,000	-	77,258,000	729,257,000
19		Wihlah Setie	651,999,000	-	91,990,000	743,989,000
20		Gegarang	651,999,000	-	84,287,000	736,286,000
21		Jamur Konyel	651,999,000	-	81,111,000	733,110,000
22		Merodot	651,999,000	-	55,331,000	707,330,000
23		Sintep	651,999,000	-	67,103,000	719,102,000
24		Gele Pulo	651,999,000	-	52,422,000	704,421,000
VI.	KETOL		-			
1		Bah	651,999,000	-	71,906,000	723,905,000
2		Blang Mancung	651,999,000	-	47,799,000	699,798,000
3		Bintang Pepara	651,999,000	-	115,910,000	767,909,000
4		Burlah	651,999,000	-	61,970,000	713,969,000
5		Buter	651,999,000	-	62,496,000	714,495,000
6		Cang Duri	651,999,000	-	68,709,000	720,708,000
7		Geulumpang Payung	651,999,000	-	50,365,000	702,364,000
8		Jaluk	651,999,000	-	68,989,000	720,988,000
9		Kala Ketol	651,999,000	-	163,588,000	815,587,000
10		Karang Ampar	651,999,000	-	185,906,000	837,905,000
11		Kekuyang	651,999,000	-	126,546,000	778,545,000
12		Kute Gelime	651,999,000	-	67,988,000	719,987,000
13		Pantan Penyo	651,999,000	-	88,135,000	740,134,000
14		Pantan Reduk	651,999,000	-	51,019,000	703,018,000
15		Pondok Balik	651,999,000	-	57,343,000	709,342,000
16		Rejewali	651,999,000	-	66,392,000	718,391,000
17		Serempah	651,999,000	-	149,923,000	801,922,000
18		Bergang	651,999,000	-	165,962,000	817,961,000
19		Blang Mancung Bawah	651,999,000	-	54,650,000	706,649,000
20		Buge Ara	651,999,000	-	88,207,000	740,206,000
21		Genting Bulen	651,999,000	-	52,919,000	704,918,000
22		Jalan Tengah	651,999,000	-	86,384,000	738,383,000
23		Jerata	651,999,000	-	63,752,000	715,751,000
24		Simpang Juli	651,999,000	-	100,330,000	752,329,000
25		Selon	651,999,000	-	64,079,000	716,078,000
VII.	KEBAYAKAN		-			
1		Bukit Sama	651,999,000	-	51,565,000	703,564,000
2		Gunung Bukit	651,999,000	-	39,439,000	691,438,000
3		Jongkok Meluem	651,999,000	-	41,189,000	693,188,000
4		Kelupak Mata	651,999,000	-	81,354,000	733,353,000
5		Lot Kala	651,999,000	-	77,105,000	729,104,000
6		Mendale	651,999,000	-	71,179,000	723,178,000
7		Paya Reje Tami Dalem	651,999,000	144,096,000	50,334,000	846,429,000
8		Paya Tumpi	651,999,000	144,096,000	36,696,000	832,791,000
9		Pinangan	651,999,000	-	104,746,000	756,745,000
10		Bukit	651,999,000	144,096,000	20,692,000	816,787,000
11		Bukit Ewih Tami Delem	651,999,000	-	46,206,000	698,205,000
12		Gunung Bahgie	651,999,000	-	64,630,000	716,629,000
13		Gunung Balohen	651,999,000	-	45,596,000	697,595,000
14		Jongkok Bathin	651,999,000	-	50,283,000	702,282,000
15		Kala Lengkie	651,999,000	-	44,025,000	696,024,000
16		Kute Lot	651,999,000	-	68,437,000	720,436,000
17		Paya Tumpi Baru	651,999,000	144,096,000	61,388,000	857,483,000
18		Paya Tumpi I	651,999,000	-	38,606,000	690,605,000
19		Timangan Gading	651,999,000	-	108,853,000	760,852,000
20		Telege Atu	651,999,000	144,096,000	48,194,000	844,289,000
VIII.	KUTE PANANG		-			
1		Atu Gogop	651,999,000	-	68,026,000	720,025,000
2		Balik	651,999,000	-	132,360,000	784,359,000
3		Buter Balik	651,999,000	-	53,169,000	705,168,000
4		Dedingin	651,999,000	-	58,108,000	710,107,000
5		Kute Panang	651,999,000	-	43,445,000	695,444,000
6		Lukub Sabun	651,999,000	-	74,401,000	726,400,000
7		Pantan Sile	651,999,000	-	49,642,000	701,641,000

8		Ratawali	651,999,000	-	39,254,000	691,253,000
9		Segene Balik	651,999,000	-	166,389,000	818,388,000
10		Tapak Moge	651,999,000	-	35,514,000	687,513,000
11		Tawar Miko	651,999,000	-	57,373,000	709,372,000
12		Tawardi	651,999,000	-	57,942,000	709,941,000
13		Timang Rasa	651,999,000	-	177,526,000	829,525,000
14		Wih Nongkal	651,999,000	-	53,230,000	705,229,000
15		Bukit Rata	651,999,000	-	66,239,000	718,238,000
16		Lukub Sabun Barat	651,999,000	-	108,661,000	760,660,000
17		Lukub Sabun Tengah	651,999,000	-	47,710,000	699,709,000
18		Lukub Sabun Timur	651,999,000	-	92,878,000	744,877,000
19		Wih Nongkal Toa	651,999,000	-	85,761,000	737,760,000
20		Tapak Moge Timur	651,999,000	-	42,386,000	694,385,000
21		Empu Balik	651,999,000	-	56,115,000	708,114,000
22		Blang Balik	651,999,000	-	33,331,000	685,330,000
23		Kala Nongkal	651,999,000	-	43,788,000	695,787,000
24		Pantan Jerik	651,999,000	-	35,270,000	687,269,000
IX.	CELALA		-			
1		Arul Gading	651,999,000	-	101,458,000	753,457,000
2		Belang Kekumur	651,999,000	-	162,525,000	814,524,000
3		Berawang Gading	651,999,000	-	126,677,000	778,676,000
4		Celala	651,999,000	-	213,470,000	865,469,000
5		Cibro	651,999,000	-	85,214,000	737,213,000
6		Kuyun	651,999,000	-	211,126,000	863,125,000
7		Kuyun Toa	651,999,000	-	51,601,000	703,600,000
8		Kuyun Uken	651,999,000	-	204,378,000	856,377,000
9		Makmur	651,999,000	-	51,149,000	703,148,000
10		Melala	651,999,000	144,096,000	149,826,000	945,921,000
11		Paya Kolak	651,999,000	-	205,259,000	857,258,000
12		Ramung Ara	651,999,000	-	60,137,000	712,136,000
13		Sepakat	651,999,000	-	53,833,000	705,832,000
14		Tanoh Depet	651,999,000	-	123,071,000	775,070,000
15		Uning Berawang Ramung	651,999,000	-	62,953,000	714,952,000
16		Blang Delem	651,999,000	-	72,737,000	724,736,000
17		Depet Indah	651,999,000	144,096,000	96,478,000	892,573,000
X.	LUT TAWAR		-			
1		Takengon Timur	651,999,000	-	109,683,000	761,682,000
2		Asir Asir	651,999,000	-	87,465,000	739,464,000
3		Asir Asir Asia	651,999,000	-	51,677,000	703,676,000
4		Bale Atu	651,999,000	-	63,270,000	715,269,000
5		Bujang	651,999,000	-	47,528,000	699,527,000
6		Gunung Suku	651,999,000	-	124,581,000	776,580,000
7		Hakim Bale Bujang	651,999,000	-	164,825,000	816,824,000
8		Kenawat	651,999,000	-	134,210,000	786,209,000
9		Kuteni Reje	651,999,000	-	42,229,000	694,228,000
10		Pedemun One One	651,999,000	-	40,708,000	692,707,000
11		Rawe	651,999,000	-	112,633,000	764,632,000
12		Takengon Barat	651,999,000	-	66,286,000	718,285,000
13		Toweren Antara	651,999,000	-	101,228,000	753,227,000
14		Toweran Toa	651,999,000	-	82,518,000	734,517,000
15		Toweren Uken	651,999,000	-	60,521,000	712,520,000
16		Teluk One-One	651,999,000	-	25,732,000	677,731,000
17		Merah Mersa	651,999,000	-	34,639,000	686,638,000
18		Waq Toweren	651,999,000	-	97,412,000	749,411,000
XI.	ATU LINTANG		-			
1		Atu Lintang	651,999,000	-	167,681,000	819,680,000
2		Merah Mege	651,999,000	-	92,145,000	744,144,000
3		Merah Pupuk	651,999,000	-	90,222,000	742,221,000
4		Merah Muyang	651,999,000	144,096,000	147,828,000	943,923,000
5		Gayo Murni	651,999,000	144,096,000	106,844,000	902,939,000
6		Kepala Akal	651,999,000	-	108,121,000	760,120,000
7		Tanoh Abu	651,999,000	-	104,956,000	756,955,000
8		Bintang Kekelip	651,999,000	144,096,000	53,066,000	849,161,000
9		Merah Jernang	651,999,000	144,096,000	130,426,000	926,521,000
10		Damar Mulyo	651,999,000	-	64,140,000	716,139,000
11		Pantan Damar	651,999,000	-	63,328,000	715,327,000
XII.	JAGONG JEGET		-			
1		Merah Said	651,999,000	-	85,838,000	737,837,000
2		Berawang Dewal	651,999,000	-	152,574,000	804,573,000
3		Gegarang	651,999,000	-	137,104,000	789,103,000
4		Telege Sari	651,999,000	-	73,822,000	725,821,000
5		Jeget Ayu	651,999,000	144,096,000	60,145,000	856,240,000

6		Paya Tungel	651,999,000	-	101,877,000	753,876,000
7		Jagong Jeget	651,999,000	-	60,084,000	712,083,000
8		Bukit Sari	651,999,000	-	71,129,000	723,128,000
9		Bukit Kemuning	651,999,000	-	96,701,000	748,700,000
10		Paya Dedep	651,999,000	-	68,504,000	720,503,000
XIII.	BIES		-			
1		Bies Penentanan	651,999,000	-	67,024,000	719,023,000
2		Bies Baru	651,999,000	-	59,406,000	711,405,000
3		Bies Mulie	651,999,000	-	37,043,000	689,042,000
4		Aru Latong	651,999,000	-	71,043,000	723,042,000
5		Simpang Lukup Badak	651,999,000	-	38,431,000	690,430,000
6		Atang Jungket	651,999,000	-	57,354,000	709,353,000
7		Tebes Lues	651,999,000	-	46,503,000	698,502,000
8		Pucuk Deku	651,999,000	-	42,756,000	694,755,000
9		Lenga	651,999,000	-	41,451,000	693,450,000
10		Uning Pegantungen	651,999,000	144,096,000	54,820,000	850,915,000
11		Simpang Uning Niken	651,999,000	-	44,679,000	696,678,000
12		Karang Bayur	651,999,000	-	28,623,000	680,622,000
XIV.	RUSIP ANTARA		-			
1		Pantan Tengah	651,999,000	-	119,650,000	771,649,000
2		Rusip	651,999,000	-	59,089,000	711,088,000
3		Pilar	651,999,000	-	145,402,000	797,401,000
4		Arul Pertik	651,999,000	144,096,000	161,336,000	957,431,000
5		Pilar Jaya	651,999,000	-	90,957,000	742,956,000
6		Tirmi Ara	651,999,000	-	102,088,000	754,087,000
7		Atu Singkih	651,999,000	-	62,777,000	714,776,000
8		Pantan Bener	651,999,000	-	45,516,000	697,515,000
9		Kerawang	651,999,000	-	83,483,000	735,482,000
10		Mekar Maju	651,999,000	144,096,000	83,679,000	879,774,000
11		Paya Tampu	651,999,000	144,096,000	233,752,000	1,029,847,000
12		Tanjung	651,999,000	-	82,298,000	734,297,000
13		Merandeh Paya	651,999,000	-	167,359,000	819,358,000
14		Kuala Rawa	651,999,000	-	140,401,000	792,400,000
15		Pilar Wih Kiri	651,999,000	-	48,532,000	700,531,000
16		Lut Jaya	651,999,000	-	123,944,000	775,943,000
TOTAL			192,339,705,000	4,322,880,000	26,687,963,000	223,350,548,000

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

270	Bies Mulie	651.999,000	Berkembang	1	46.01516408	264	-	728	0.00339589	0.000339589	12	0.00069525	0.00034762	5.030353125	0.00116487	0.00017473	25.26946779	0.00210424	0.00052606	0.001388	37,043,000	689,042,000
271	Aru Latong	651.999,000	Berkembang	3	54.21671752	78	-	754	0.00351717	0.000351717	48	0.002781	0.0013905	6.007678875	0.00139118	0.00020868	34.15784463	0.0028444	0.000711099	0.002662	71,043,000	723,042,000
272	Simpang Lukut Badak	651.999,000	Berkembang	2	46.95865438	255	-	333	0.00155334	0.000155334	18	0.00104287	0.00052144	1.293519375	0.00029954	4.4931E-05	34.50468327	0.00287328	0.000718319	0.00144	38,431,000	690,430,000
273	Atang Jungket	651.999,000	Berkembang	3	45.63273594	269	-	624	0.00291076	0.000291076	52	0.00301275	0.00150637	0.821282143	0.00019018	2.8527E-05	15.51862632	0.00129227	0.000323067	0.002149	57,354,000	709,353,000
274	Tebes Lues	651.999,000	Maju	2	55.45599452	39	-	1052	0.00490724	0.000490724	22	0.00127462	0.00063731	4.31173125	0.00099846	0.00014977	22.32100001	0.00185872	0.000464679	0.0017425	46,503,000	698,502,000
275	Pucuk Deku	651.999,000	Berkembang	1	52.58016424	128	-	436	0.0020338	0.00020338	15	0.00098494	0.00043453	2.8744875	0.00066564	9.9846E-05	41.51838009	0.00345732	0.000864331	0.0016021	42,756,000	694,755,000
276	Lenga	651.999,000	Berkembang	1	50.48864989	194	-	651	0.00303671	0.000303671	17	0.00098494	0.00049247	2.8744875	0.00066564	9.9846E-05	31.568283	0.00262876	0.000657189	0.0015532	41,451,000	693,450,000
277	Uning Pagatungen	651.999,000	Berkembang	3	57.79429539	11	144,096,000	498	0.00232301	0.000232301	36	0.00208575	0.00104287	1.580968125	0.0003661	5.4915E-05	34.77769508	0.00289601	0.000724003	0.0020541	54,820,000	850,915,000
278	Simpang Uning Niken	651.999,000	Berkembang	1	44.19836288	281	-	877	0.00409092	0.000409092	17	0.00098494	0.00049247	2.8744875	0.00066564	9.9846E-05	32.31424741	0.00269088	0.000672719	0.0016741	44,679,000	696,678,000
279	Karang Bayur	651.999,000	Berkembang	1	47.81378985	236	-	385	0.0017959	0.00017959	11	0.00063731	0.00031866	2.053205357	0.00047546	7.1318E-05	24.15909385	0.00201178	0.000902945	0.0010725	78,623,000	680,622,000
280	Rusip Antara	651.999,000	Berkembang	4	39.11639564	292	-	1193	0.00556496	0.000556496	82	0.00475087	0.00237543	25.15176562	0.00582434	0.00087365	32.55477439	0.0027109	0.000677726	0.0044833	119,650,000	771,649,000
281	Rusip	651.999,000	Tertinggal	2	50.78288666	184	-	814	0.00379705	0.000379705	30	0.00173812	0.00086906	5.748975	0.00133128	0.00019969	36.77612297	0.00306243	0.000765606	0.0022141	59,089,000	711,088,000
282	Pilar	651.999,000	Berkembang	5	51.13070247	171	-	725	0.00338189	0.000338189	137	0.00793743	0.00396871	8.013917159	0.00185577	0.00027836	41.4526422	0.00345185	0.000862962	0.0054482	145,402,000	797,401,000
283	Aru Peritik	651.999,000	Berkembang	6	58.39018101	7	144,096,000	608	0.00283613	0.000283613	150	0.00869061	0.00434531	10.06070625	0.00232974	0.00034946	51.24784664	0.00426752	0.001066879	0.0060453	161,336,000	957,431,000
284	Pilar Jaya	651.999,000	Tertinggal	4	52.94569577	119	-	551	0.00257024	0.000257024	70	0.00405562	0.00202781	4.31173125	0.00099846	0.00014977	46.76618023	0.00389432	0.00097358	0.0034082	90,957,000	742,956,000
285	Tirmi Ara	651.999,000	Tertinggal	4	54.12368367	82	-	444	0.00207112	0.000207112	77	0.00446118	0.00223059	3.593109375	0.00083205	0.00012481	60.65667964	0.00505101	0.001262752	0.0038253	102,088,000	754,087,000
286	Atu Singkih	651.999,000	Berkembang	2	55.30572508	43	-	673	0.00313933	0.000313933	33	0.00191194	0.00095597	4.31173125	0.00099846	0.00014977	44.79720175	0.00373036	0.000932589	0.0023523	62,777,000	714,776,000
287	Pantan Bener	651.999,000	Berkembang	1	54.69712487	63	-	202	0.00094227	9.42265E-05	12	0.00069525	0.00034762	4.31173125	0.00099846	0.00014977	53.50525126	0.0044555	0.00113874	0.0017055	45,516,000	697,515,000
288	Kerawang	651.999,000	Tertinggal	3	52.55231772	130	-	340	0.00158599	0.000158599	52	0.00301275	0.00150637	7.18621875	0.0016641	0.00024961	58.29176833	0.00485408	0.00121352	0.0031281	83,483,000	735,482,000
289	Mekar Maju	651.999,000	Berkembang	4	58.85636022	4	144,096,000	263	0.00122681	0.000122681	67	0.00388181	0.0019409	7.18621875	0.0016641	0.00024961	39.49761922	0.00328905	0.000822263	0.0031355	83,679,000	879,774,000
290	Paya Tampu	651.999,000	Berkembang	7	57.22356784	18	144,096,000	591	0.00275683	0.000275683	242	0.01402086	0.00701043	16.24085437	0.00376086	0.00056413	43.63816927	0.00363384	0.000908461	0.0087587	233,752,000	1,029,847,000
291	Tanjung	651.999,000	Tertinggal	4	51.86228782	148	-	363	0.00169328	0.000169328	61	0.00353418	0.00176709	6.182714631	0.00143172	0.00021476	44.79525837	0.0037302	0.000932549	0.0030837	82,298,000	734,297,000
292	Merandeh Paye	651.999,000	Tertinggal	5	55.13704087	48	-	393	0.00183322	0.000183322	134	0.00776362	0.00388181	25.15176562	0.00582434	0.00087365	63.99222322	0.00532877	0.001332192	0.006271	167,359,000	819,358,000
293	Kuala Rawa	651.999,000	Tertinggal	5	52.57339849	129	-	489	0.00228103	0.000228103	115	0.0066628	0.0033314	16.6720275	0.0038607	0.00057911	53.90617202	0.00448888	0.00112222	0.0052608	140,401,000	792,400,000
294	Pilar Wih Kir	651.999,000	Tertinggal	1	53.87715376	90	-	515	0.00240231	0.000240231	17	0.00098494	0.00049247	0.961670059	0.00022269	3.3404E-05	50.55157534	0.00420954	0.001052384	0.0018185	48,532,000	700,531,000
295	Lut Jaya	651.999,000	Sangat Tertinggal	5	49.29811997	217	-	296	0.00138075	0.000138075	101	0.00585168	0.00292584	9.55510443	0.00221265	0.00033319	59.96657917	0.00499354	0.001248386	0.0046442	123,944,000	775,943,000
Total		192,339,705,000			x	x	4,322,880,000	214,377	1.000	10%	17,260	1.000	50%	4,318,390	1.000	15%	12,008,822	1.000	0.250	1.000	26,687,963,000	223,350,548,000

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa	223,350,548,000	JP	10% Alokasi Dasar	651,999,000
Hasil Pehitungan Pagu Dana Desa	223,350,548,000	JPM	50% Alokasi Afirmasi	181,634,000
Pagu Alokasi Dasar	192,339,705,000	LW	15% Alokasi Afirmasi	363,269,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	192,339,705,000	IKG	25% Alokasi Kinerja	144,096,000
Pagu Alokasi Afirmasi	-			
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	-			
Pagu Alokasi Kinerja	4,322,880,000			
Hasil Hitung Alokasi Kinerja	4,322,880,000			
Pagu Alokasi Formula	26,687,963,000			
Hasil Hitung Alokasi Formula	26,687,963,000			
Jumlah Desa	295			
Jumlah Desa Penerima AK	30			

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR